

# ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA

FRISCHA PRISCILLA REFASI  
30.1474

Asdaf Kabupaten Waropen , Provinsi Papua  
Program Studi Keuangan Publik  
E-mail: [Chupika528@gmail.com](mailto:Chupika528@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Tun Huseno, M.Si

## ABSTRACT

**Problems/Background:** The low regional original income (PAD) of Waropen Regency has resulted in the high level of dependence of the regional government on transfer funds from the central government. **Purpose:** This study aims to determine the level of regional financial capacity of Waropen Regency in supporting the implementation of regional autonomy during the 5-year budget period seen from financial ratio analysis and to determine the factors that affect the regional financial capacity and the efforts made in order to improve the regional financial capacity. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used in this study is the Waropen Regency APBD Realization Report as secondary data and the results of interviews from Waropen Regency BPKAD officials as primary data. Data analysis uses data reduction analysis methods, data presentation, data description through financial ratio analysis: the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of financial independence, the ratio of regional financial dependence, and the ratio of the effectiveness of local revenue management, and drawing conclusions. **Results/Finding :** The results showed that the level of ability. Waropen Regency's regional finances are still low, especially during the 5-year budget period, namely from 2016-2020 with an average fiscal decentralization ratio of 7.67%, the ratio of the degree of regional financial dependence to 83.24%, the ratio of financial independence to 9.19%, but in terms of the effectiveness of PAD management, it has shown good results with a figure of 94.68%. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, strategic efforts from the Regional Government are needed which can be carried out by empowering regional potentials that can be used as sources of regional income and also in the form of extensification or intensification of existing sources of regional income, especially in regional taxes.

**Keywords:** Financial Analysis, Financial Capability, Regional Autonomy

## ABSTRAK

**Masalah/Latar belakang (GAP):** Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Waropen berakibat pada tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Waropen dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah selama 5 tahun periode anggaran yang dilihat dari analisis rasio keuangan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Waropen sebagai data sekunder dan hasil wawancara dari Pejabat BPKAD Kabupaten Waropen sebagai data primer. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Waropen masih rendah khususnya selama 5 tahun periode anggaran yaitu dari tahun 2016-2020 dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 7,67%, rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 83,24%, rasio kemandirian keuangan 9,19%, namun dalam hal efektivitas pengelolaan PAD sudah menunjukkan hasil yang baik dengan angka 94,68%. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diperlukan upaya strategis dari Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan potensi daerah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan juga dalam bentuk ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber pendapatan daerah yang ada terutama dalam pajak daerah.

**Kata Kunci:** Analisis Keuangan, Kemampuan Keuangan, Otonomi Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, merupakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah yang merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Untuk mengukur kemampuan daerah yang tercermin dari APBD maka perlu dilakukan analisis rasio keuangan Menurut Faud (2012) "Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya. Angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode serta dapat dilakukan antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan". Dalam rangka mewujudkan realisasi dari dilaksanakannya otonomi daerah di Kabupaten Waropen maka dalam hal ini perlu dilakukannya pemanfaatan anggaran yang sesuai dan dapat memberikan manfaat. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengelola anggaran. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Waropen dengan data yang ada masih bergantung dengan dana transfer dari pusat, sehingga persentase antara dana transfer ke daerah dengan pendapatan daerah masih besar untuk mendanai urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer merupakan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dipakai sebagai indikator untuk dapat menentukan kemampuan keuangan daerah. Fluktuasi ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor misalnya saja pada tahun 2020 dimana anggaran yang ada lebih



rendah dari tahun sebelumnya dan hal ini dipengaruhi karena pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19. sehingga banyak juga dilakukan pemangkasan anggaran, bukan hanya untuk wilayah Kabupaten Waropen saja tapi di beberapa daerah juga menghemat anggaran yang ada dari apa yang diterima oleh daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang semakin menurun dalam 4 tahun terakhir ini disebabkan karena pembangunan yang lain yang sempat tertunda. Apabila melihat situasi-situasi kebelakang pada tahun tersebut memang benar banyak fenomena yang dialami oleh daerah maupun oleh kondisi politik.

Pendapatan Asli Daerah yang lebih rendah ini bisa disebabkan oleh kontribusi kepala daerah yang belum bisa mengendalikan situasi ataupun kondisi di masyarakat untuk melakukan pembangunan, pelayanan, ataupun pemanfaatan anggaran lainnya karena disebabkan kepehaman masyarakat yang menolak pembangunan itu untuk dilakukan.

Permasalahan seperti kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah terutama bagi daerah sebagai pelaksana dari otonomi daerah. Maka diperlukan sebuah analisis untuk melihat kemampuan keuangan Kabupaten Waropen dan juga melihat apakah ada masalah atau faktor yang menghalangi Kabupaten Waropen untuk dapat melaksanakan kemandirian daerah sesuai dengan semestinya. Sekiranya dalam anggaran yang diterima oleh waropen adalah untuk dapat dikembangkan dan dijadikan dasar untuk melakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kemampuan dari daerah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Berdasarkan realisasi anggaran yang ada dan data yang ada di lapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Waropen yaitu mengenai **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah Di Kabupaten Waropen Provinsi Papua”**

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada tahun 2020 dimana anggaran yang ada lebih rendah dari tahun sebelumnya dan hal ini dipengaruhi karena pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19. sehingga banyak juga dilakukan pemangkasan anggaran, bukan hanya untuk wilayah Kabupaten Waropen saja tapi di beberapa daerah juga menghemat anggaran yang ada dari apa yang diterima oleh daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang semakin menurun dalam 4 tahun terakhir ini disebabkan karena pembangunan yang lain yang sempat tertunda. Pendapatan Asli Daerah yang lebih rendah ini bisa disebabkan oleh kontribusi kepala daerah yang belum bisa mengendalikan situasi ataupun kondisi di masyarakat untuk melakukan pembangunan, pelayanan, ataupun pemanfaatan anggaran lainnya karena disebabkan kepehaman masyarakat yang menolak pembangunan itu untuk dilakukan. Permasalahan seperti kontribusi Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah terutama bagi daerah sebagai pelaksana dari otonomi daerah. Maka diperlukan sebuah analisis untuk melihat kemampuan keuangan Kabupaten Waropen dan juga melihat apakah ada masalah atau faktor yang menghalangi Kabupaten Waropen untuk dapat melaksanakan kemandirian daerah sesuai dengan semestinya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Anjar Nora, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiantmaja, pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan *Trend* pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Menggunakan Metode dalam penelitian yakni metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dimana pada penelitian ini ditemukan bahwa Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng masuk kategori terendah sekali. Dan rata-rata kemampuan keuangan daerah

di kategorikan rendah dengan pola instruktif. Namun *Trend* yang dihasilkan cenderung naik

Penelitian yang dilakukan oleh Gebriany Wenur pada tahun 2013 dengan judulnya yaitu Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam membiayai belanja daerah Kota Bitung. Dimana Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dan juga Hasil penelitian menunjukkan PAD Kota Bitung lebih kecil di banding belanja daerahnya. Sehingga perlu peningkatan PAD dengan upaya intensifikasi, karena kontribusi Pajak/Retribusi daerah dominan dalam PAD hingga tahun 2011

Penelitian menurut Jovan Febriantoko, yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Dan Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode penelitian kuantitatif. Dimana secara keseluruhan untuk penelitian ini ditemukan bahwa Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian di Pulau Sumatera disimpulkan bahwa total PAD Provinsi Se-pulau Sumatera sebesar 18,025 Triliun. Derajat desentralisasi fiskal tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara dan terendah pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Penelitian oleh Deddy Candra, Vince Ratnawati, dan Yesi Mutia ini memiliki judul yaitu Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Dimana Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode penelitian kuantitatif. Dimana pada hasil dari penelitian ini yaitu Provinsi Riau terus mengalami tren positif pertumbuhan tingkat kemandirian meskipun tingkat pertumbuhannya masih dengan pola hubungan instruktif.

Penelitian menurut Muhamad Nur Afandi dan Ropen Sianipar dengan judul Analisis kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah kabupaten labuhanbatu selatan. Dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menemukan bahwa Kemampuan keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan bisa melaksanakan tugas pemerintahan yaitu pelayanan publik dan pembangunan yang baik.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Meskipun berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa ternyata permasalahan mengenai kemampuan keuangan ini sudah pernah dikaji sebelumnya. Namun, dalam hal ini pada lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu pada kabupaten waropen provinsi papua tentunya belum pernah dikaji mengenai permasalahan ini. Sehingga tentu saja dari segi lokasi dan juga waktu penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di daerah lain. penelitian ini juga dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda memberikan gambaran juga bahwa kondisi yang dihadapi ataupun periode waktu yang dilewati oleh setiap daerah tentunya selalu berubah-ubah sehingga kondisi keuangan ini untuk mendukung kemandirian suatu daerah juga bisa bergantung kepada bagaimana situasi yang dihadapi terkhususnya pada 4 tahun terakhir dri sebelum pandemi covid-19 sampai kepada pemulihan pasca pandemi covid-19.



### 1.5. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kemandirian daerah di Kabupaten Waropen Provinsi Papua
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kemandirian daerah di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Waropen dalam meningkatkan analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kemandirian daerah di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

## II. METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan output yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau metode kuantitatif. Penelitian kualitatif menunjukkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada manusia. Creswell (2016: 4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode menggali dan memahami makna yang dianggap sejumlah individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan peneliti juga menggunakan pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang memberikan pemahaman konsep yang bersifat khusus Kepada konsep yang bersifat umum, serta penarikan kesimpulan dilakukan secara umum berdasarkan fakta empiris di lapangan. Peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder sebagai berikut:

Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada pegawai Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Waropen. Penulis mendapatkan data sekunder untuk penelitian ini berupa Realisasi Pendapatan Kabupaten Waropen tahun 2018-2021. Penggunaan teknik *Purposive Sampling* dipilih oleh peneliti dalam pemilihan informan agar dapat mempermudah peneliti dalam mencari informasi. Orang-orang yang ditentukan sebagai informan adalah orang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang detail dan akurat. Dan dalam penelitian ini peneliti sendiri menjadi instrumen penelitian guna menemukan data-data secara langsung di lapangan. penyajian data dikelompokkan kedalam kata-kata maupun simbol tertentu. Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data terhadap angka-angka yang terdapat dalam data sekunder yang didukung dengan penjelasan melalui wawancara yang akan disajikan sebagai data primer. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga akan disesuaikan dengan batasan masalah yang akan dikaji dan data yang diperoleh dari informan, maupun lokasi penelitian, dan juga sumber lainnya. Secara umum, terdapat 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

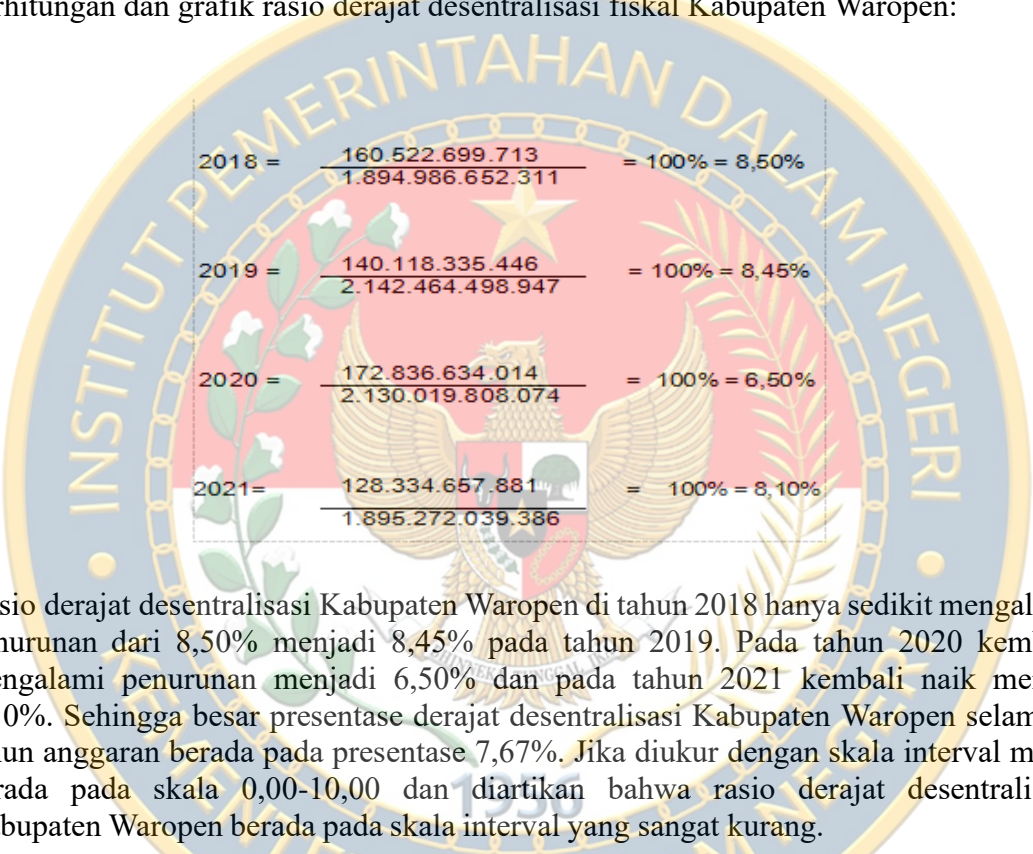
Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan analisa terhadap wawancara yang dilakukan pada beberapa pegawai yang berada di BPKAD Kabupaten Waropen turut

didukung oleh pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dengan analisis rasio keuangan menggunakan teori Kemampuan Keuangan Daerah menurut (Mahmudi (2019), yang memiliki 4 (empat) indikator yakni Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan dan Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD.

## A. Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ini dihitung dengan adanya perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Berikut perhitungan dan grafik rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Waropen:



2018 =	$\frac{160.522.699.713}{1.894.986.652.311}$	= 100% = 8,50%
2019 =	$\frac{140.118.335.446}{2.142.464.498.947}$	= 100% = 8,45%
2020 =	$\frac{172.836.634.014}{2.130.019.808.074}$	= 100% = 6,50%
2021 =	$\frac{128.334.657.881}{1.895.272.039.386}$	= 100% = 8,10%

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Waropen di tahun 2018 hanya sedikit mengalami penurunan dari 8,50% menjadi 8,45% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 6,50% dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 8,10%. Sehingga besar presentase derajat desentralisasi Kabupaten Waropen selama 4 tahun anggaran berada pada presentase 7,67%. Jika diukur dengan skala interval maka berada pada skala 0,00-10,00 dan diartikan bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Waropen berada pada skala interval yang sangat kurang.

### 2. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah. Rasio dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan lain yang berasal dari sumber lain, yakni bantuan pemerintah pusat dan provinsi maupun hibah. Perhitungan dan grafik Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Waropen tahun anggaran 2016-2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kabupaten Waropen adalah sebagai berikut :



2018 =	$\frac{160.522.699.713}{1.894.986.652.311}$	= 100% = 9,7%
2019 =	$\frac{140.118.335.446}{2.142.464.498.947}$	= 100% = 6,5%
2020 =	$\frac{172.836.634.014}{2.130.019.808.074}$	= 100% = 10,2%
2021 =	$\frac{128.334.657.881}{1.895.272.039.386}$	= 100% = 8,45%

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 presentase kemandirian rasio kemandirian keuangan Kabupaten Waropen berjumlah 9,7% kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6,5%. kemudian meningkat menjadi 10,2% pada tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 8,45%. Berdasarkan data tersebut maka rata-rata rasio kemandirian keuangan Kabupaten Waropen sebesar 9,19% dan berada pada skala 0-25 dapat diartikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Waropen berada pada skala interval rendah sekali sehingga menunjukkan adanya pola hubungan instruktif di mana peran pemerintah pusat dominan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih begitu minim sehingga kemandirian daerah masih sangat rendah.

### 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan dalam rasio Ketergantungan Keuangan Daerah digunakan demi mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer. Rasio ini memperlihatkan seberapa tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi. Perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2016-2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kabupaten Waropen adalah sebagai berikut:


2018 =	$\frac{166.441.748.858}{1.967.057.544.123}$	= 100% = 83,90%
2019 =	$\frac{160.522.699.713}{1.894.986.652.311}$	= 100% = 86,70 %
20120 =	$\frac{140.118.335.446}{2.142.464.498.947}$	= 100% = 79,32%
2021 =	$\frac{172.836.634.014}{2.130.019.808.074}$	= 100% = 80,12%

tingginya tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Waropen dengan persentase 83,24%. Jika diukur dengan skala interval seperti yang maka berada pada

skala >50,00. Sehingga diartikan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Waropen berada pada skala interval yang begitu tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih tingginya kontribusi dari pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah Kabupaten Waropen dan secara otomatis juga menunjukkan bahwa masih rendahnya sumbangsih PAD Kabupaten Waropen terhadap total pendapatan daerah.

#### 4. Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin efektif. Perhitungan dan grafik rasio Efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten waropen tahun 2017-2020 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kabupaten Waropen adalah sebagai berikut :



2018 =	$\frac{160.522.699.713}{1.894.986.652.311}$	= 100% = 89,7%
2019 =	$\frac{140.118.335.446}{2.142.464.498.947}$	= 100% = 87,5%
2020 =	$\frac{172.836.634.014}{2.130.019.808.074}$	= 100% = 94,68%
2021 =	$\frac{128.334.657.881}{1.895.272.039.386}$	= 100% = 85,31%

Presentase efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Waropen berada pada angka 94,68%. Jika dilihat dari skala interval diartikan bahwa Kabupaten Waropen dikategorikan cukup efektif dalam pengelolaan PAD. Walaupun masih mengalami penurunan tahun anggaran 2018 dan 2021 . Hal ini sesuai hasil penelitian yang ada berdasarkan uraian Subbidang Akutansi BPKAD Kabupaten Waropen yang dapat disimpulkan bahwa efektivitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya potensi daerah, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan oleh sumber daya yang ada.

### 3.2 Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Waropen

#### a. Pemungutan Pajak dan Retribusi Belum Optimal

Kemampuan Keuangan Kabupaten Waropen tentunya dapat dilihat melalui hasil pendapatan asli daerah yang ada, salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Waropen sangat di tentukan oleh sistem manajemen yang berfungsi dalam mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi.

#### b. Potensi Daerah Kabupaten Waropen belum di manfaatkan secara optimal

Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen perlu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada di Kabupaten Waropen. Kabupaten Waropen memiliki kondisi geografis yang merupakan daerah pesisir pantai yang otomatis dekat dengan



lautan namun meliki daratan juga yang luas sehingga apabila di dimanfaatkan dan di kelola dengan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi PAD Kabupaten Waropen.

### **c. Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen terhadap Dana Transfer**

Ketergantungan pemerintah Kabupaten Waropen terhadap dana transfer menjadi faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dikarenakan transfer pemerintah pusat atau provinsi memberikan kontribusi yang lebih dominan dalam total pendapatan daerah Kabupaten Waropen dibandingkan dengan PAD Kabupaten Waropen sendiri. Dilihat pada anggaran pendapatan Kabupaten Waropen tahun anggaran 2015-2019 masih bergantung dan sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana yang berasal dari pihak eksternal, dimana pemerintah pusat berperan besar dalam memfasilitasi kegiatan dan program pemerintah daerah Kabupaten Waropen.

### **A. Faktor Pendorong yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Waropen**

Adapun faktor pendorong yang juga turut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Waropen. Apabila faktor pendorong tersebut dilaksanakan secara optimal maka akan mengurangi dampak negatif yang diberikan oleh faktor penghambat yang telah diuraikan sebelumnya. Faktor pendorong yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Waropen yaitu adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Waropen terkait pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Waropen berusaha membuat berbagai kebijakan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Waropen khususnya terkait pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber penerimaan terbesar Kabupaten Waropen yakni Pajak Daerah, dalam pelaksanaan pemungutannya sudah dibuat berbagai kebijakan guna pencapaiannya menjadi maksimal.

### **3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah**

Bertambahnya sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam hal kapasitas tentunya dengan pemanfaatan potensi daerah yang dapat digali dengan semaksimal mungkin sehingga tidak ada potensi daerah Kabupaten Waropen yang terabaikan dan tidak dikelola dengan baik, mengingat begitu banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya BPKAD harus mencari peluang-peluang sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya dengan teliti dan cermat serta sejumlah strategi agar realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah bisa mencapai hasil lebih dari target penerimaan yang ditetapkan.

Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa saat ini pemerintah daerah kabupaten Waropen sedang giatnya guna meningkatkan realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap para wajib pajak agar memiliki kesadaran yang tinggi akan pembayaran pajak daerah dan juga mengembangkan teknologi berbasis *online* dalam pembayaran pajak daerah dengan harapan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak tersebut.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

pada penelitian terdahulu Menurut Anjar Nora, tahun 2018 dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan *Trend* pada Pemerintah Kabupaten

Buleleng. Dengan metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu, didasari dengan mengukur kemampuan keuangan dengan rasio kemandirian keuangan daerah diketahui dengan kondisi terendah dan juga rata-rata kemampuan daerah dikategorikan rendah dengan pola instruktif. Namun *trend* yang dihasilkan cenderung baik. Hal yang membedakan penelitian ini yaitu pada penemuan masalahnya, yaitu peneliti tidak memprediksi *trend* keuangan daerah pada penelitian yang akan dilakukan ini.

Gebriany Wenur, 2013 melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung. Meskipun penelitian yang ditulis oleh Gebriany tersebut membahas Analisis Kemampuan namun dari fokus permasalahan yang dibahas juga tentunya berbeda dimana pada penelitian ini, peneliti akan meninjau lebih jauh terkait kemampuan keuangan dalam pelaksanaan kemandirian daerahnya.

Jovan Febriantoko dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Kemampuan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian di Pulau Sumatera disimpulkan bahwa total PAD Provinsi di Provinsi Sumatera tertinggi pada Sumatera Utara dan terendah pada Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan yang sangat jelas pada penelitian ini adalah objek wilayah yang sangat luas pada penelitian yang dilakukan oleh Jovan Febriantoko. Sedangkan pada penelitian ini hanya berdasarkan kepada lokasi kemampuan keuangan di Kabupaten Waropen.

Menurut hasil dari penelitian Dedy Candra dalam penelitiannya tentang menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan perbandingan antara sesama Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau. Dengan hasil penelitiannya berfokus pada *trend* pertumbuhan tingkat kemandirian. Dan dari hasil itu sangat berbeda. Penelitian menurut Dedy Candra ini hasilnya dibandingkan dari tiap Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kemandirian di Provinsi Riau. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan kepada fokus lokasinya hanya kepada satu Kabupaten saja.

Penelitian Ahmad Nur tentang analisis kemampuan keuangan untuk menunjang otonomi daerahnya, dengan hasil yang didapatkan yaitu, Kabupaten Labuhan Batu yang masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Namun pada pelaksanaan tugas pemerintahan yaitu pelayanan publik dan pembangunan sudah dilakukan cukup baik. Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada lokus penelitian.

Berdasarkan dari hasil dan temuan dari setiap penelitian terdahulu tersebut, pada dasarnya setiap kemampuan keuangan yang ada dipengaruhi juga oleh potensi yang dimiliki dari setiap daerah tersebut. Karena perputaran ekonomi dan juga transaksi yang diberikan oleh setiap potensi yang dimiliki apabila bermanfaat dengan baik dan maksimal akan memberikan dampak juga kepada pemerintah daerah yang kemudian akan diberikan kembali kepada masyarakat. Yang pada dasarnya setiap hal yang bisa dikelola oleh masyarakat tentunya selama hal itu baik tentunya pemerintah juga akan mendapatkan dampaknya dan kemudian akan berdampak juga kepada kemampuan keuangan daerah yang semakin meningkat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan pada kemampuan



keuangan oleh kabupaten waropen untuk mendukung kemandirian dari daerah pada dasarnya diberlakukan juga setiap kebijakan dan upaya yang mengedepankan kepada pemanfaatan setiap potensi yang dimiliki daerah untuk bisa dikelola bersama baik oleh masyarakat dan daerah untuk pembangunan yang semakin lebih baik.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan terkait analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Waropen, sebagai berikut:

1. Hasil analisis keuangan secara keseluruhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Waropen tahun anggaran 2016-2020, maka kemampuan keuangan daerah masih kurang dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam jangka waktu tahun anggaran 2016-2020 dengan rincian analisis
  - a. Hasil analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Waropen berada pada angka rata-rata 7,67%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Waropen masih sangat kurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.
  - b. Hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan berada pada angka rata-rata 9,19%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Waropen memiliki kemandirian keuangan yang masih sangat rendah bahkan terjadi pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat begitu mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
  - c. Hasil analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Waropen ada pada angka rata-rata di atas 83,24%. Hal ini menunjukkan sangat tingginya ketergantungan daerah atas pendapatan dari dana transfer umum dan bantuan keuangan provinsi.
  - d. Hasil analisis Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Waropen berada pada angka 94,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah termasuk dalam kategori cukup efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.
2. Analisis faktor penghambat tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Waropen yaitu, antara lain:
  - a. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal.
  - b. Potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
  - c. Tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Waropen terhadap dana transfer.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yakni antara lain:
  - a. Menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah baru untuk dijadikan objek maupun subjek dari pajak dan retribusi daerah
  - b. Adanya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
  - c. Mengembangkan inovasi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan teknologi informasi berbasis online sebagai sarana pendukung bagi pendataan, penetapan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan dari penelitian ini yaitu, dimana dari segi pelaksanaan dimana untuk melihat beragam potensi yang dimiliki oleh daerah peneliti tidak bisa mendalami untuk mengetahui lebih jauh mengenai potensi daerah dikarenakan untuk memperoleh data maupun wawancara kepada beberapa

narasumber memiliki keterbatasan waktu. Namun dalam penelitian ini peneliti bisa mendapatkan beberapa data yang mendukung disusunnya penelitian ini dengan realisasi anggaran yang ada dan juga didukung dengan wawancara yang cukup dengan informan/ narasumber yang berkenan dalam memberikan informasi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian ini dilakukan tentunya dengan harapan besar bahwa mengetahui permasalahan yang ada di daerah tertentu dan mempelajari solusi yang diberikan oleh setiap pihak terkait dengan memberikan informasi juga kepada daerah lain untuk saling bertukar pikiran dan ide yang ada di setiap daerah. Maka dari itu besar harapan bahwa penelitian ini tentunya masih jauh dari kata kesempurnaan harapannya bahwa permasalahan ini bisa dikaji lebih dalam lagi di setiap daerah sehingga bisa menemukan titik final dari solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan daerah baik untuk mendukung kemandirian, atau pengelolaan yang berujung kepada tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

#### **V . Ucapan Terima Kasih**

Peneliti sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kabupaten waropen yang telah menerima dan membantu peneliti untuk melakukan dan menyelesaikan penelitian ini. Dan secara khusus juga dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada para Pejabat, pegawai dan unsur lainnya di BPKAD kabupaten waropen yang membantu saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Serta kepada pihak lain yang membantu peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J.W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Faud, Ramli Muhammad. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Mahmudi. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Nora, Anjar. dkk 2018. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng*. Bisma Jurnal Manajemen
- Febriantoko, Jovan. 2017. *Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera* . Google Scholar
- Affandi dan Sianipar. 2018 . *Analisis kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah kabupaten labuhanbatu selatan*. Jurnal Emba
- Candra, Deddy. dkk. 2016. *Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau*. Google Scholar
- Wenur, Gebriany. 2013. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung*. Jurnal Emba